

Kode/Nama Rumpun Ilmu: 561/Ekonomi Pembangunan

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN MANDIRI**



**ANALISIS KEMAMPUAN DAN KINERJA KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO**

PENELITI:

**Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.
NIP. 19720725 200604 1002**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
MARET 2012**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peta perkembangan penerimaan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan desentralisasi fiskal. b) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peta perkembangan penerimaan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan desentralisasi fiskal. c) Untuk memberikan gambaran kemampuan derajat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Gorontalo. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan didahului penggunaan metode analisis pengukuran kemampuan fiskal daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa ; a) Seluruh daerah otonom di Provinsi Gorontalo kecenderungan proporsi penerimaan sendiri masih sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan lewat mekanisme Dana Perimbangan. b) Pengeluaran pemerintah daerah otonom di Provinsi Gorontalo proporsi belanja langsung lebih besar untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung, kecuali Gorontalo Utara. c) Kemampuan dan kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih kecil, dengan sendirinya kemandirian fiskal masih jauh dari yang diharapkan.

Judul Penelitian : Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

Peneliti

a) Nama Lengkap : Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.

b) NIP/NIDN : 197207252006041002/0025077203

c) Pangkat/Jabatan Fungsional : III D/Lektor

d) Pusat Penelitian : Lemlit UNG

e) Alamat : Kampus Jambura Jl. Sudirman No. 6
Kota Gorontalo

f) Alamat Rumah : Jalan Anggur Perumahan Agrindo II
Dungigi, Kota Gorontalo

g) Alamat Surel (e-mail) : amier_archam@yahoo.com

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 (Dua) Bulan

Biaya Penelitian : Mandiri

Gorontalo, 20 Maret 2014

Mengetahui;
Dekan Fakultas Ekonomi



Inran R. Hambali, S.Pd., S.E., MSA.
NIP. 19700623 199903 1005

Peneliti


Dr. Muh. Amir Arham, M.E.
NIP. 19720725 200604 1002

Menyetujui;

Ketua Lembaga Penelitian UNG



Dr. Hj. Fitryane Lihawa, M.Si.
NIP. 19691209 199303 2001

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstraksi	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Khusus	2
1.4. Manfaat Penelitian	3
Bab II Kajian Pustaka	4
2.1. Penerimaan Daerah	4
2.2. Pengeluaran Daerah	6
Bab III Metode Penelitian	8
3.1. Metode Penelitian	8
3.2. Objek Penelitian	8
3.3. Jenis dan Sumber Data	8
3.4. Model Analisis	8
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	11
4.1. Hasil Penelitian	11
4.1.1. Penerimaan	11
4.1.2. Pengeluaran	21
4.2. Pembahasan	33
Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Saran	37
5.1. Kesimpulan	37
5.2. Implikasi	37
5.3. Saran	37
Daftar Pustaka	39
Lampiran-Lampiran	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan 13 tahun, terus mengalami perbaikan karena tak dapat dipungkiri dalam perjalanannya masih terdapat celah yang kurang ideal. Payung hukum pelaksanaan otonomi daerah yang di dalamnya terkait pengaturan politik dan demokrasi lokal, juga desain pelaksanaan kegiatan perekonomian dan keuangan daerah dianggap belum sempurna. Walaupun demikian, desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negara yang luas dan heterogen seperti Indonesia. Pada perkembangannya beberapa daerah sukses menjalankan otonomi daerah (*best practice*), namun tidak sedikit sebaliknya yang muncul *bad practice*. Ekses negatif pelaksanaan desentralisasi yang paling menonjol dipermukaan pada aspek politiknya, meski disadari dalam praktek kegiatan ekonomi juga banyak masalah.

Tulisan ini lebih berkonsentrasi pada pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah, pada bidang ini sebetulnya dari segi implementasi justru tak kalah buruknya. Cukup banyak daerah gagal menciptakan kesejahteraan, tapi diperlukan pencermatan karena tidak terlalu nampak hiruk pikuk. Idealnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kabupaten/kota diharapkan makin memiliki kemandirian karena kewenangan yang diberikan makin luas. Realitasnya desentralisasi fiskal belum mampu menciptakan kemandirian keuangan, bahkan ada kecenderungan ketergantungan tetap tinggi. Inilah menjadi masalah fundamental pelaksanaan otonomi daerah pada aspek ekonomi dan keuangan daerah. Atas kondisi itu pemerintah terus melakukan penyempurnaan mekanisme transfer sekaligus memberikan perhatian terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat memungut sumber-sumber pendapatannya secara optimal sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Namun, praktek pemungutannya tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tetap menciptakan iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha. Sejalan dengan itu

pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 dengan tujuan memperbesar basis pendapatan daerah, serta menciptakan kepastian hukum terhadap penarikan pajak daerah.

Perluasan basis pajak dan retribusi daerah dalam jika dicermati belum dapat berjalan optimal terutama daerah-daerah potensi ekonominya kecil. Transfer dan hibah masih menjadi tumpuan utama pendanaan pembangunan dan pelayanan publik, karena itu jika melihat perkembangan transfer setiap tahun terus naik, kendati besaran PAD juga meningkat tapi proporsi penerimaan sebagian besar kabupaten/kota cenderung menurun. Dengan demikian kemandirian daerah diyakini masih jauh dari cita-cita luhur pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kondisi ini tidak jauh berbeda di Provinsi Gorontalo. Dari enam kabupaten/kota (daerah otonom) kapasitas fiskal yang berkategori tinggi hanya Kota Gorontalo, sementara yang lainnya masih kategori sedang dan rendah. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka peneliti merasa perlu melakukan kajian berkaitan dengan “Analisis Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana peta perkembangan penerimaan pemerintah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan desentralisasi fiskal?
2. Bagaimana peta perkembangan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan desentralisasi fiskal?
3. Seberapa besar derajat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Gorontalo?

1.3. Tujuan Khusus

Sementara penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peta perkembangan penerimaan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan desentralisasi fiskal.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peta perkembangan penerimaan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan desentralisasi fiskal
3. Untuk memberikan gambaran kemampuan derajat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Menjadi masukan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Gorontalo, maupun masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan pembangunan yang memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah untuk melakukan desain penerimaan sekaligus untuk merumuskan pengelolaan keuangan daerah terutama pada penetapan penerimaan dan memiliki implikasi terhadap pengembangan perekonomian daerah.
- c. Menjadi bahan acuan bagi kajian ataupun penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari a) Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), b) Pendapatan Asli Daerah (Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah). Dana perimbangan merupakan komponen penting yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah untuk membiaya pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan, sedangkan PAD merupakan gambaran kemampuan kemandirian keuangan daerah.

Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro, 2007). Untuk kajian ini kendati dana perimbangan diperlukan pula untuk menganalisis kemampuan dan kapasitas fiskal daerah, namun PAD merupakan hal yang pokok untuk dianalisis berkaitan dengan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Namun dalam perkembangannya, PAD secara proporsi masih terlalu kecil terhadap dana perimbangan. Hal ini memberikan gambaran bahwa daerah masih sangat bergantung terhadap transfer dari pusat. Minimnya proporsi PAD terhadap total pendapatan kemudian pemerintah melakukan desain ulang guna untuk mendorong peningkatan proporsi PAD dengan melakukan revisi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan memperluas basis pendapatan. Instrumen utama yang digunakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan

transfer ke daerah. Mengingat bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih sangat terbatas, maka diperlukan penguatan *taxing power* daerah (Nota Keuangan APBN 2010).

Terkait dengan itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Undang-undang tersebut memberikan basis pajak dan retribusi yang lebih luas dan tingkat diskresi yang lebih tinggi. Arham (2013) Di dalam UU PDRD, dijelaskan reformulasi dilakukan untuk meningkatkan PAD dengan mengeluarkan lima paket kebijakan baru.

- 1) *Pertama*, menaikkan tarif pajak kendaraan ber-motor dari 5 persen menjadi 10 persen, serta menerapkan pajak progresif. Dasar penilaian progresifitas tarif adalah nilai jual kendaraan bermotor, kepemilikan, usia kendaraan bermotor, dan jenis bahan bakar.
- 2) *Kedua*, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinaikkan dari 10 persen menjadi 20 persen. Penerapan pajak progresif juga diterapkan di jenis pajak ini. Ukurannya adalah nilai jual kendaraan bermotor, kepemilikan, dan usia kendaraan bermotor. Selain untuk meningkatkan PAD, kebijakan ini sekaligus sebagai disinsentif untuk membeli kendaraan bermotor sehingga mampu menghemat konsumsi BBM.
- 3) *Ketiga*, menaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari 5 persen menjadi maksimum 10 persen. Pajak jenis ini menganut diskriminasi tarif, yakni dibedakan untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan jenis bahan bakar.
- 4) Kebijakan *keempat* adalah pemberlakuan pajak parkir dengan menaikkan tarif maksimum dari 20 persen menjadi 30 persen.
- 5) Kebijakan *kelima* adalah pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas.

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (*local taxing empowerment*), dilakukan melalui beberapa kebijakan, yaitu (Nota Keuangan APBN 2013):

- a. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan.
- b. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- c. Kenaikan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- d. Pemberian diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali Pajak Rokok. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk diberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari adanya kebijakan *closed-list system*. Dalam kaitan ini, daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Pengeluaran Daerah

APBD memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui kebijakan di sisi pendapatan dan belanja daerah. Melalui sisi pengeluaran, dana APBD yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap kegiatan investasi dan

perekonomian daerah. Sebagian besar dari pelaksanaan belanja modal menghasilkan output berupa infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Sedangkan sebagian dari belanja barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat daerah (Nota Keuangan APBN 2013).

Berdasarkan hal tersebut, belanja pemerintah daerah diperuntukan secara makro, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kedua jenis belanja ini diharapkan menganut prinsip efisiensi, ada beberapa prinsip umum yang dipergunakan dalam melakukan efisiensi belanja dalam pelayanan publik;

- a. Manfaat *scale of economics*, pemberian layanan publik wajib dipertimbangkan manfaat ekonominya, jangan sampai biayanya lebih besar daripada manfaat yang diraih.
- b. *Eksternalities factor*, pelayanan publik yang diselenggarakan suatu pemerintah daerah mengutamakan kepentingan masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya.
- c. *Resources economic and administrative capacity*, tiap daerah memiliki potensi ekonomi dan kapasitas administrasi yang berbeda-beda. Semakin besar perbedaan antardaerah, semakin diperlukan ketelitian dalam mendistribusikan pelayanan publik.
- d. Pelayanan masyarakat lebih variatif karena itu lebih efisien jika pelayanan publik dilakukan pemerintah level bawah.
- e. Stabilitas Ekonomi Makro menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, karena itu pelayanan yang diberikan kepada daerah adalah pelayanan yang tidak memiliki dampak atau pengaruh yang luas secara nasional.

Sekalipun ada prinsip-prinsip yang jadi acuan untuk belanja daerah namun jarang prinsip itu dijadikan patokan. Jika dilihat perkembangannya, sebagian belanja daerah sangat tidak efisien yang cenderung tidak mendorong perkembangan ekonomi dan menstimulasi kegiatan investasi di daerah. Serapan belanja lebih banyak ke belanja tidak langsung (rutin), belanja langsung (modal dan investasi) relatif minim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan dari beberapa metode yang digunakan untuk mendesain penelitian. Metode penelitian menjadi sangat penting untuk memberikan pedoman dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah keuangan daerah dan perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dimana di kabupaten/kota dijadikan sebagai objek, karena titik tekan pelaksanaan otonomi daerah diletakkan pada daerah kabupaten/kota. Keuangan daerah tercermin dari struktur penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD setiap tahunnya. Komposisi dari pos-pos pengeluaran dalam APBD dikaji untuk menguak posisi fiskal daerah dan derajat desentralisasi fiskal pada periode 2001 - 2012.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder untuk perekonomian daerah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing kabupaten. Data sekunder keuangan daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan RI dan data penunjang lainnya diperoleh dari instansi terkait.

3.4. Metode Analisis

Pemecahan masalah dalam penelitian ini digunakan analisis deksriptif melalui pengukuran derajat kemandirian fiskal fiskal daerah Pengukuran yang

dapat digunakan untuk melihat kemampuan keuangan dan kinerja keuangan daerah dengan mengadopsi Musgrave dan Musgrave (1991), yaitu mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

$$= \frac{PAD}{TRD} \quad (1.1)$$

$$= \frac{BHPBP}{TRD} \quad (1.2)$$

$$= \frac{SP}{TRD} \quad (1.3)$$

Sedangkan untuk menilai kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah dengan persamaan sebagai berikut (Halim, 2001), antara lain:

$$= \frac{PAD}{TED} \quad (1.4)$$

$$= \frac{PAD}{TED} \quad (1.5)$$

$$= \frac{PAD}{PR} \quad (1.6)$$

$$= \frac{PAD + BHPBP}{TED} \quad (1.7)$$

Dimana:

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
BHPBP	= Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
TRD	= Total Penerimaan Daerah
TED	= Total Pengeluaran Daerah
PR	= Pengeluaran Rutin
SP	= Sumbangan dari Pusat

Asumsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasi persamaan-persamaan di atas, yaitu semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut cenderung semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa transfer pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan

derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut (Landiyanto, 2005).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Penerimaan

Mengacu pada instrumen hukum dan arah kebijakan tersebut, kajian ini bermaksud melihat perkembangan keuangan kabupaten/kota di Gorontalo terutama dari sisi penerimaan (*revenue*). Sumber penerimaan daerah terdiri dari Dana Perimbangan dan PAD itu sendiri. Kedua sumber penerimaan ini akan dilihat proporsinya untuk membuktikan dugaan bahwa transfer (Dana Perimbangan) makin meningkat sementara proporsi PAD menurun. Tentu saja penerapannya dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo.

Untuk memudahkan pembacaannya maka pemetaan dilakukan perdaerah (kabupaten/kota) selama periode awal pelaksanaan otonomi daerah 2001 hingga tahun 2012. Sementara tiga kabupaten akan dianalisis mulai tahun fiskal pertama dimana daerah tersebut baru berdiri, Kabupaten Pohuwato tahun 2005, Kabupaten Bone Bolango tahun 2006 dan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2008. Meskipun sesungguhnya Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdiri sendiri bersamaan, namun ketersediaan data perekonomian daerah dan keuangan daerah tidak bersamaan.

a. Kabupaten Boalemo

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1.
Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan Kab. Boalemo, 2001 – 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2001	2,651.44	112,514.12
2002	5,324.51	117,249.70
2003	11,336.55	144,315.75
2004	13,902.28	94,567.70
2005	4,578.90	90,471.00
2006	8,986.31	201,844.25
2007	11,562.68	252,927.91
2008	13,733.34	263,407.39
2009	15,099.00	271,596.00
2010	15,493.39	270,219.89
2011	12,972.76	318,377.17
2012	13,310.12	356,386.41

Sumber: APBD Kab. Boalemo 2001 - 2012, Diolah

Tabel 4.1 memberikan informasi bahwa PAD mau-pun Dana Perimbangan (DP) Kabupaten Boalemo dari tahun 2001 – 2003 mengalami peningkatan. Peningkatan PAD lebih dua kali lipat dari tahun sebelumnya, setidaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kenaikan pendapatan perkapita. Asumsinya makin tinggi pendapatan perkapita, maka kemampuan masyarakat membayar kewajibannya makin meningkat, seperti membayar pajak dan retribusi daerah. Disamping efek dari kegiatan ekonomi masyarakat, serta perluasan penarikan pajak maupun retribusi daerah.

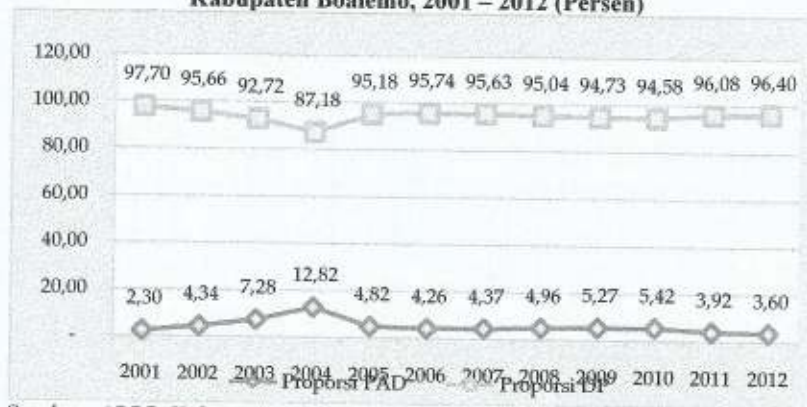
Sementara kenaikan Dana Perimbangan (DP) didorong oleh pembenahan organisasi pemerintah daerah, karena komponen utama DP adalah DAU yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai. Transfer ke daerah meningkat juga karena adanya kenaikan penerimaan negara, sebab proporsi transfer ditentukan sebesar 25 % dan sekarang meningkat menjadi 26 % dari netto penerimaan negara. Apabila penerimaan negara mengalami kenaikan maka transfer ke daerah juga naik.

Pada tahun 2005 sumber-sumber penerimaan Kabupaten Boalemo menurun, komponen PAD paling signifikan penurunannya secara proporsi hampir tiga kali lipat. Penurunan PAD tidak dapat disangkal sebagai dampak dari adanya pemekaran kabupaten baru (Pohuwato). Data ini mengindikasikan bahwa justru

wilayah pemekaran lebih memiliki potensi dibandingkan daerah induknya. Melihat perkembangan Kabupaten Pohuwato dari sarana infrastruktur dasar maupun pembangunan fisik saat ini lebih maju dari Kabupaten Boalemo.

Jika dilihat dari proporsi PAD dan DP terhadap total pendapatan Kabupaten Boalemo mulai tahun 2001 – 2004 trendnya cukup baik, artinya ada kecenderungan PAD meningkat dan DP menurun secara proporsi. Jika trend ini terus bertahan maka Kabupaten Boalemo *on the track* untuk menuju kemandirian fiskal. Tapi karena adanya pemekaran kondisinya berubah, justru berkebalikan DP cenderung naik, dan PAD menurun proporsinya terhadap total pendapatan. Ilustrasi kedua jenis proporsi penerimaan Kabupaten Boalemo dapat disimak pada grafik 4.1 berikut ini.

Grafik 4.1.
Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Boalemo, 2001 – 2012 (Persen)



Sumber: APBD Kab. Boalemo 2001 - 2012, Diolah.

Proporsi pendanaan APBD bersumber dari PAD Kabupaten Boalemo sebelum ada pemekaran menunjukkan kenaikan, bahkan tahun 2004 mencapai 12,82 %. Namun setelahnya terus menurun hingga tahun 2012 tinggal rata-rata 4 %, artinya upaya memaksimalkan potensi fiskal tidak berjalan baik. Disamping kemampuan ekonomi juga relatif terbatas karena masih sangat bergantung dari sektor primer, sementara sektor sekunder dan tersier belum berkembang. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Boalemo masih lebih banyak berharap pembiayaan APBD sumber-nya dari pusat.

b. Kabupaten Gorontalo

Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah yang paling luas. Gorontalo sekaligus merupakan daerah induk untuk semua wilayah yang ada di jazirah Provinsi Gorontalo. Namun seiring perjalanan waktu Gorontalo sudah terbagi tiga sejak tahun 2004 dan tahun 2007. Pemekaran wilayah relatif tidak terlalu menggerogoti penerimaan daerah lewat PAD maupun DP, karena kedua sumber penerimaan tidak mengalami penurunan sebagaimana dialami Kabupaten Boalemo.

Pada tahun 2003 PAD Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 18, 212 miliar menurun sekitar Rp. 6 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp. 12,059 miliar. Wilayah yang dimekarkan (Bone Bolango) diasumsikan potensi fiskalnya rendah sehingga dampaknya terhadap PAD Kabupaten Gorontalo relatif kecil. Sedangkan penurunan Dana Perimbangan sekitar Rp. 85 miliar, termasuk kecil, karena perangkat daerah pemekaran biasanya masih ramping, belum lengkap strukturnya sehingga biaya birokrasi masih rendah. Pendanaan cenderung lebih banyak pada pembenahan infrastruktur perkantoran maupun penataanlaksanaan perangkat pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan
Kab. Gorontalo, 2001 – 2012

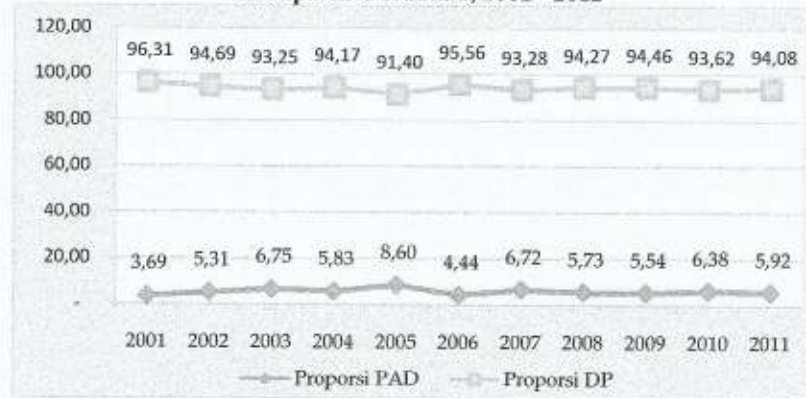
Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2001	6,442.06	168,302.80
2002	11,081.81	197,436.24
2003	18,212.47	251,459.68
2004	12,059.97	194,884.36
2005	19,606.67	208,391.94
2006	16,692.70	359,335.20
2007	19,944.69	277,008.00
2008	21,505.59	353,963.36
2009	24,896.00	424,348.00
2010	28,366.44	416,146.96
2011	30,413.37	483,326.03
2012	33,595.20	534,854.51

Sumber: APBD Kab. Gorontalo 2001 - 2012, Diolah

Tabel 4.2 di atas juga memberikan informasi ketika Gorontalo Utara berdiri sendiri pada tahun 2007, PAD Kabupaten Gorontalo hanya berkurang sekitar Rp. 2

miliar. Tahun berikutnya PAD Kabupaten Gorontalo tetap mengalami peningkatan hingga tahun 2012. Lain halnya transfer cenderung menurun drastis. Sementara gambaran proporsi kedua komponen penerimaan Kabupaten Goron-talo lebih cenderung stabil dari tahun ke tahun selama pelaksanaan desentralisasi fiskal seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.2.
Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Gorontalo, 2001 - 2012



Sumber: APBD Kab. Gorontalo 2001 - 2012, Diolah

Rata-rata 94 % kebutuhan pendanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo berasal dari Dana Perimbangan. Sementara PAD proporsinya hanya berkisar 3 % dari total pendapatan daerah. Kabupaten Gorontalo sangat bergantung terhadap transfer dari pusat, masih jauh dari ideal untuk menciptakan kemandirian pembiayaan. Jika terjadi *turbulence* ekonomi nasional, maka dampaknya sangat kuat terhadap Kabupaten Gorontalo, karena proporsi transfer ditentukan sebesar 26 % dari netto penerimaan negara.

Interpretasinya, *turbulence* ekonomi akan mengurangi penerimaan negara dengan demikian transfer ke daerah akan berkurang. Oleh karena itu desentralisasi diharapkan mendorong kemandirian ekonomi bagi daerah untuk meminimumkan resiko fiskal bila terjadi krisis secara nasional. Tapi kondisi ini merata di hampir semua kabupaten/kota di Indonesia, bukan hanya Kabupaten Gorontalo saja bergantung *grant*. Hanya saja beberapa daerah di wilayah lain trendnya cukup baik dimana proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dan sebaliknya Dana Perimbangan (DP) menurun.

c. Kota Gorontalo

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo relatif lebih baik dari daerah otonom lainnya di Provinsi Gorontalo. Makin menguatkan teori bahwa daerah dimana sektor sekunder dan tersier lebih dominan berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) potensi fiskalnya juga makin besar. Dengan asumsi itu, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Selama pelaksanaan otonomi daerah tahun fiskal 2001 – 2012, rata-rata kenaikan PAD Kota Gorontalo sebesar 32 %. Tahun 2001 PAD Kota Gorontalo masih berada dikisaran Rp. 6 miliar dan tahun 2012 sudah mencapai Rp. 87 miliar. Akumulasi kenaikan Dana Perimbangan juga mengalami kenaikan cukup signifikan, pada tahun 2001 DP Kota Gorontalo sebesar Rp. 112,514 miliar dan tahun 2012 sudah mencapai Rp. 415,139 miliar. Perhatikan tabel 4.3. dibawah ini.

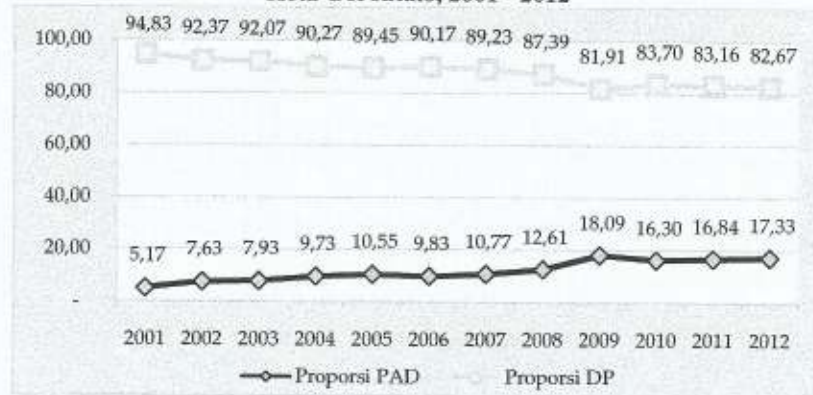
Tabel 4.3.
Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan
Kota Gorontalo, 2001 – 2012

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2001	6,136.38	112,514.12
2002	10,101.94	122,332.11
2003	11,966.57	139,022.88
2004	16,589.98	153,970.83
2005	18,000.00	152,576.85
2006	26,228.43	240,470.96
2007	35,053.37	290,282.94
2008	45,995.09	318,813.52
2009	73,903.00	334,515.00
2010	61,250.00	314,582.07
2011	68,400.33	337,789.74
2012	87,000.00	415,139.04

Sumber: APBD Kota Gorontalo 2001 - 2012, Diolah

Proporsi pendanaan APBD Kota Gorontalo jauh lebih baik karena sudah mencapai di atas 10 % bersumber dari PAD. Sementara proporsi PAD dan Dana Perimbangan terhadap total penerimaan terus mengalami perbaikan dan trendnya cukup positif. Proporsi Dana Perimbangan menurun dan proporsi PAD naik sehingga bentuk kurva-nya dalam jangka panjang akan berimpitan jika kondisi fiskalnya terus stabil. Simak grafik 4.3 berikut ini.

Grafik 4.3.
Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
Kota Gorontalo, 2001 - 2012



Sumber: APBD Kota Gorontalo 2001 - 2012, Diolah.

Agenda mendasar bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebagai pusat kegiatan ekonomi, administrasi dan pen-didikan menjaga kondusifitas. Syarat ini diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi wilayah. Perekonomian Kota Gorontalo sangat bergantung pada sektor sekunder dan tersier, mobilitas kegiatan ekonomi maupun tenaga kerja cukup dinamis.

Faktor demografi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, urbanisasi penduduk akan terus berjalan. Mobilitas penduduk dari luar Provinsi Gorontalo juga terus bertambah, dengan jumlah penduduk yang relatif masih sedikit urbanisasi dan mobilitas penduduk dari luar masih dibutuhkan untuk menggerakkan pereko-nomian. Oleh sebab itu penertiban dan penataan kependudukan perlu dilakukan secara hati-hati. Meski dalam jangka panjang memberikan beban perkotaan.

d. Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo, relatif lebih maju jika diban-dingkan dengan daerah induknya. Banyak prestasi yang dicapai, penataan kotanya juga lebih baik dari seluruh kabupaten yang ada di Gorontalo. Meskipun kondisi fiskalnya tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, keter-gantungan pendanaan dari pusat lumayan tinggi.

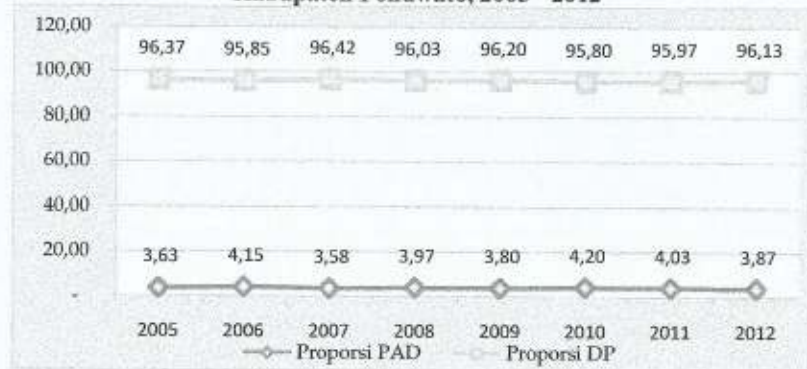
Tabel 4.4.
Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan
Kab. Pohuwato, 2006 – 2012

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2006	9,119.41	210,590.60
2007	9,579.94	257,868.27
2008	12,060.03	291,583.07
2009	12,106.00	306,152.00
2010	13,668.93	311,632.58
2011	15,175.87	361,429.60
2012	16,386.58	406,836.08

Sumber: APBD Kab. Pohuwato 2006 - 2012, Diolah.

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas menggambarkan bahwa PAD Kabupaten Pohuwato meningkat setiap tahun. Pada tahun 2006 PAD Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 9,119 miliar meningkat menjadi Rp. 16,386 miliar. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Boalemo sebagai daerah induk dari Pohuwato PAD-nya lebih tinggi. Walau proporsi pendanaan pembangunan dan pelayanan publik masih sangat besar dari Dana Perimbangan rata-rata di atas 96 %, proporsi PAD hanya berkisar 4 % setiap tahun. Simak grafik 4.4 berikut ini.

Grafik 4.4.
Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Pohuwato, 2005 - 2012



Sumber: APBD Kab. Pohuwato 2005 - 2012, Diolah.

Grafik 4.4 memberikan ilustrasi bahwa kondisi fiskal Kabupaten Pohuwato tidak terlalu baik untuk mencapai kemandirian. Padahal semasa masih menyatu dengan Boalemo trend proporsi sumber pendanaan cukup baik. Setelah ada pemekaran kondisi fiskal Boalemo cenderung buruk, Pohuwato dianggap daerah potensial menurunkan PAD Kabupaten Boalemo. Setelah menjadi daerah otonom

sendiri diasumsikan trend proporsi sumber pendanaan Kabupaten Pohuwato menjadi lebih baik. Akan tetapi jika dicermati pergerakan grafik 3.4 di atas mengindikasikan bahwa penggalan potensi fiskal untuk meningkatkan PAD belum dilakukan optimalisasi, termasuk meminimumkan resiko kebocoran pungutan.

e. Kabupaten Bone Bolango

Pembangunan antar wilayah di Bone Bolango masih sangat timpang, infrastruktur masih minim. Kelebihannya, sekaligus kelemahan Bone Bolango dekat dengan ibukota provinsi, limpahan kegiatan ekonomi kota akan diterima oleh Bone Bolango. Sebaliknya *backwash effect* ekonomi Bone Bolango akan ditarik oleh Kota Gorontalo karena umumnya wilayah perkotaan tarikan ekonominya lebih kuat, diban-dingkan daerah *rural*. Kalaupun terjadi pengembangan, maka biasanya terjadi di wilayah pinggiran kota yang berbatasan dengan daerah *rural*.

Namun demikian, jangka panjang efek kegiatan ekonomi perkotaan akan berimbas secara langsung ke wilayah *rural* (Bone Bolango). Apalagi pembangunan dan pengembangan beberapa lembaga pendidikan kedepan memberikan dampak ekonomi yang besar, termasuk rencana kampus Universitas Negeri Gorontalo akan ber-pindah ke wilayah ini. Hanya saja saat ini, potensi fiskalnya masih rendah hal itu terlihat dari realisasi penerimaan lewat PAD, bahkan tahun 2012 realisasi PAD Kabupaten Bone Bolango menurun, lihat tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5.
Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan
Kab. Bone Bolango, 2001 – 2012

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2006	2,864.14	224,694.62
2007	5,169.30	264,812.53
2008	4,426.37	330,890.01
2009	8,203.00	301,263.00
2010	14,402.88	328,971.08
2011	15,749.95	311,733.92
2012	12,750.00	375,457.00

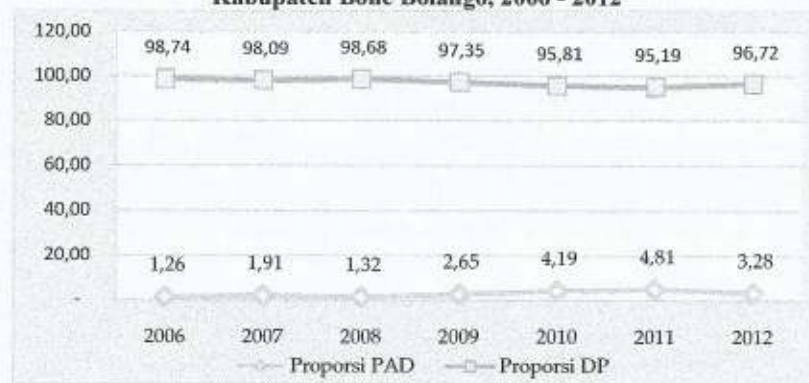
Sumber: APBD Kab. Bone Bolango 2006 - 2012, Diolah

Proporsi pendanaan tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya di Gorontalo, Dana Perimbangan masih sangat dominan rata-rata di atas 95 %, dan

PAD hanya sekitar 5 %. Tahun 2012 realisasi PAD Kabupaten Bone Bolango malahan turun sekitar Rp. 3 miliar, ada indikasi *effort* penarikan pajak dan retribusi daerah rendah sehingga target maksimal tidak tercapai.

Namun jika dicermati garis trendnya cukup baik dari tahun ke tahun, proporsi Dana Perimbangan cenderung turun dan PAD naik, lihat grafik 4.5 di bawah. Untuk jangka panjang meskipun perubahannya kecil cukup baik untuk kemandirian fiskal, karena itu diperlukan berbagai perbaikan kinerja ekonomi.

Grafik 4.5.
Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Bone Bolango, 2006 - 2012



Sumber: APBD Kab. Bone Bolango 2006 - 2012, Diolah.

Kondisi sosial politik juga penting dilakukan perbaikan, sebab nampak kabupaten ini kecenderungan konflik elit politik seringkali mengemuka yang dapat mengganggu pelayanan publik. Hal ini akan berdampak terhadap aktifitas ekonomi.

f. Kabupaten Gorontalo Utara

Gorontalo Utara memiliki banyak potensi untuk sektor perikanan dan pertanian, potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal. Beberapa tahun terakhir masih terkonsentrasi dengan pembangunan infrastruktur perkantoran. Hampir semua pendanaan terserap untuk penataan organisasi dan pembangunan kantor. Hal serupa potensi penarikan PAD masih rendah, tapi jika dilihat dari peningkatannya realisasi PAD selama lima tahun cukup lumayan, pada awal berdirinya Gorontalo Utara PAD baru mencapai Rp. 2,323 miliar dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 10,7 miliar. Lihat tabel 4.6 berikut ini.

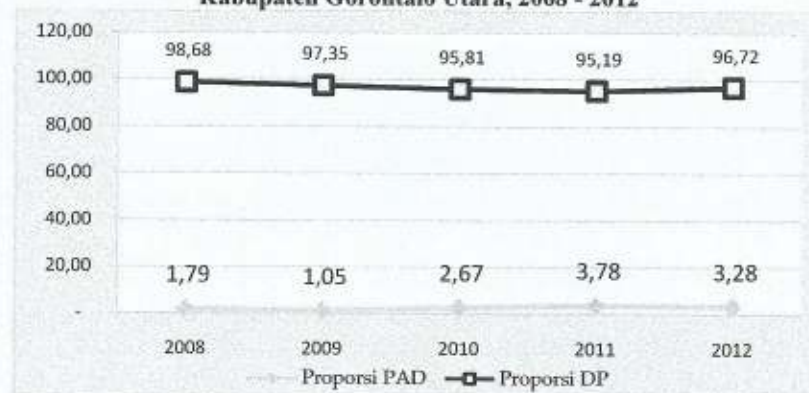
Tabel 4.6.
Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan
Kab. Gorontalo Utara, 2008 – 2012

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2008	2,323.97	127,783.40
2009	2,500.00	236,603.00
2010	6,500.00	237,369.85
2011	10,700.00	272,324.36
2012	10,700.00	315,427.79

Sumber: APBD Kab. Gorontalo 2008 - 2012, Diolah.

Proporsi pendanaan tidak jauh berbeda dengan daerah lain, tapi jika dicermati grafik 4.6 di bawah ini menggambarkan bahwa ada trend positif menuju kemandirian fiskal dalam jangka panjang. Proporsi PAD cenderung naik, dan Dana Perimbangan menurun. Sekalipun proporsi pendanaan masih sangat besar bersumber dari Dana Perimbangan.

Grafik 4.6.
Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Gorontalo Utara, 2008 - 2012



Sumber: APBD Kab. Gorontalo 2008 - 2012, Diolah

Gorontalo Utara dianalisis hanya lima tahun karena termasuk daerah otonom baru, dimekarkan pada tahun 2007. Praktis tahun 2008 baru mulai memiliki APBD sendiri.

4.1.2. Pengeluaran

Sekalipun ada prinsip-prinsip yang jadi acuan untuk belanja daerah namun jarang prinsip itu dijadikan patokan. Jika dilihat perkembangannya, sebagian belanja daerah sangat tidak efisien yang cenderung tidak

mendorong perkembangan ekonomi dan menstimulasi kegiatan investasi di daerah. Serapan belanja lebih banyak ke belanja tidak langsung (rutin), belanja langsung (modal dan investasi) relatif minim. Mengacu pada kondisi itu, tulisan ini ingin melihat sejauh mana perkembangan belanja daerah di Gorontalo, apakah belanja langsung lebih besar atau belanja tidak langsung?.

Namun demikian, perlu diperjelas definisi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah sebagai pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan diajukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Sementara Belanja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan lembaga untuk lingkungan kantor meliputi belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan serta yang lainnya yang berhubungan dengan administrasi kantor. Atau memuat seluruh pengeluaran aparatur pemerintah sehari-hari yang tiap tahun diperlukan untuk meng-amankan dalam menjamin kelangsungan tugas dan kewajiban secara efektif.

a. Kabupaten Boalemo

Jika dilihat dari postur APBD Kabupaten Boalemo tahun 2001 terjadi surplus anggaran karena total peneri-maan sebesar Rp. 99,576 sementara total pengeluarannya sebesar Rp. 91,011. Komposisi pendanaan terdiri dari belanja langsung (sebelumnya disebut pengeluaran pem-bangunan) dan belanja tidak langsung (pengeluaran rutin). Kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7.
Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kab. Boalemo, 2001 - 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2001	51,399	39,611
2002	75,656	44,128
2003	107,433	48,481
2004	92,616	32,600
2005	56,981	32,572
2006	63,211	91,361
2007	104,907	111,100
2008	104,067	122,697
2009	175,773	153,340
2010	152,491	176,183
2011	178,151	201,549
2012	192,563	228,038

Sumber: APBD Kab. Boalemo 2001 - 2012, Diolah

Hampir keseluruhan daerah otonom di Indonesia pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal komposisi pendanaan cukup baik, karena belanja langsung lebih tinggi. Namun seiring perjalanan waktu komposisinya berubah belanja tidak langsung meningkat tajam. Kabu-paten Boalemo sendiri cenderung serupa, pada tahun 2001 - 2005 belanja langsung lebih tinggi dibandingkan belanja tidak langsung.

Pada tahun 2001 belanja langsung sebesar Rp. 51,399 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 39,611 miliar. Tahun 2005 belanja langsung sebesar Rp. 56,981 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 32,572 miliar, selama lima tahun anggaran nominalnya menurun karena ada pemekaran wilayah pada tahun 2004. Mulai tahun 2007 kecuali tahun 2009 sampai tahun 2012 komposisi belanja tidak langsung mulai mengalami lonjakan, simak grafik 3.7 di bawah ini.

Grafik 3.7
Perbandingan BL dan BTL Kab. Boalemo 2001 - 2012



Sumber: APBD Kab. Boalemo 2001 - 2012, Diolah.

Perubahan pola komposisi belanja daerah karena struktur organisasi mengalami perubahan, terjadi penambahan jumlah pegawai, serta berbagai pembiayaan *unit cost* lainnya. Akibatnya belanja rutin makin naik setiap tahun, kenaikannya juga didorong oleh pengelolaan anggaran yang kurang efisien. Secara teoritis komposisi belanja yang lebih banyak terserap ke belanja rutin pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kecil. Efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas sangat minim, dampak selanjutnya kemampuan fiskal juga terbatas.

b. Kabupaten Gorontalo

Realisasi APBD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2001 total penerimaan sebesar Rp. 180,122 dan total pengeluaran sebesar Rp. 173,426, ada selisih penerimaan lebih besar. Tahun kelima pelaksanaan desentralisasi fiskal total penerimaan sebesar Rp. 237,191 miliar dan total pengeluarannya sebesar Rp. 201,225 miliar terdapat kelebihan/sisa anggaran sekitar Rp. 36 miliar. Tahun anggaran 2012 total pendapatan sebesar Rp. 660,256 miliar total pengeluaran sebesar Rp. 653,256 miliar, berarti terjadi defisit APBD. Sedangkan komposisi belanja APBD Kabupaten Gorontalo dapat dilihat tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8.
Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kab. Gorontalo, 2001 - 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2001	32,314	141,111
2002	49,699	157,589
2003	94,370	169,933
2004	191,712	179,640
2005	64,002	174,152
2006	128,699	227,424
2007	121,912	272,914
2008	139,743	247,972
2009	299,580	289,032
2010	184,008	323,875
2011	180,054	411,773
2012	223,909	429,347

Sumber: APBD Kab. Gorontalo 2001 - 2012, Diolah.

Komposisi belanja APBD Kabupaten Gorontalo untuk belanja langsung sebesar Rp. 32,314 miliar lebih kecil dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 141,111 miliar. Sampai tahun anggaran 2012 keadaannya tidak berubah belanja tidak langsung masih tetap lebih tinggi sebesar Rp. 429,347 miliar dibandingkan belanja langsung hanya sebesar Rp. 223,909 miliar. Ilustrasi perbandingan komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD Kabupaten Gorontalo tahun 2001 - 2012 dapat disimak pada grafik 4.8 berikut ini.

Grafik 4.8
Perbandingan BL dan BTL Kab. Gorontalo 2001 - 2012



Sumber: APBD Kab. Gorontalo 2001 - 2012, Diolah.

Grafik 4.8 memberikan informasi bahwa komposisi belanja langsung lebih rendah dari belanja tidak langsung, kecuali tahun 2004 ada perubahan komposisi, belanja langsung sedikit mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 belanja langsung kenaikannya cukup tinggi sebesar Rp. 299,580 miliar, tapi tahun 2010 penurunannya mencapai 50 % sebesar Rp. 184,008 miliar dan belanja tidak langsung kembali menjadi tinggi hingga tahun 2012. Pembiayaan untuk belanja barang dan jasa maupun belanja modal terbatas, akibatnya pemerintah daerah memiliki keter-batasan melakukan manuver pembiayaan ekonomi pro-duktif.

c. Kota Gorontalo

Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 menunjukkan total pendapatan Kota Gorontalo sebesar Rp. 121,787 miliar sementara total pengeluaran sebesar Rp. 105,185 terjadi surplus anggaran. Pada tahun 2012 total pendapatan sebesar Rp. 559,269 dan total pengeluaran sebesar Rp. 565,457 terjadi defisit anggaran.

Secara umum defisit anggaran dilakukan secara sengaja untuk mendorong peningkatan belanja publik dengan harapan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Desain anggaran defisit sekaligus memotivasi peningkatan penerimaan daerah dengan mencari berbagai sumber pendana-an alternatif.

Perkembangan komposisi belanja Kota Gorontalo selama 2001 – 2012 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9.
Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kota Gorontalo, 2001 - 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2001	31,105	74,079
2002	45,401	83,265
2003	60,429	91,289
2004	139,965	96,740
2005	72,200	99,269
2006	104,598	227,424
2007	145,866	202,172
2008	227,769	202,234
2009	180,692	250,371
2010	170,674	271,106
2011	225,551	331,265
2012	200,805	364,652

Sumber: APBD Kota Gorontalo 2001 - 2012, Diolah.

Terlihat bahwa belanja langsung lebih kecil daripada belanja tidak langsung dalam realisasi APBD Kota Gorontalo selama pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada tahun 2001 belanja langsung sebesar Rp. 31,105 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 74,079 miliar. Komposisi belanja keadaannya sama, kecuali tahun 2004 relatif ada peningkatan yang sangat signifikan, belanja langsung sebesar Rp. 139,965 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 96,764 miliar. Setelahnya komposisi belanja tidak langsung tetap dominan dalam APBD Kota Gorontalo hingga tahun anggaran 2012, seperti tergambar pada grafik 4.9 di bawah ini.

Grafik 4.9
Perbandingan BL dan BTL Kota. Gorontalo 2001 - 2012



Sumber: APBD Kota Gorontalo 2001 - 2012, Diolah.

Besarnya belanja tidak langsung dipicu oleh belanja pegawai maupun jenis pembiayaan lainnya yang masuk kategori rutin. Jika dicermati grafik 4.9 di atas tahun anggaran 2006 belanja tidak langsung sangat mencolok dan timpang. Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal, hanya pada tahun anggaran 2004 dan 2008 belanja langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung.

d. Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato menjadi daerah otonom sendiri tahun 2004, dengan demikian tahun fiskal mulai berjalan tahun 2005. Tahun fiskal pertama Kabupaten Pohuwato total pendapatannya sebesar Rp. 129,652.15 dan total pengeluaran sebesar 115,477.36. Tahun fiskal 2012 total pendapatan Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 447,769 miliar dan total belanja sebesar Rp. 459,180 berarti terjadi defisit. Sementara proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10.
Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kab. Pohuwato, 2005 - 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2005	68,248	42,204
2006	130,125	79,182
2007	182,834	95,442
2008	218,661	107,084
2009	183,866	172,651
2010	160,188	206,132
2011	187,324	228,287
2012	190,293	268,887

Sumber: APBD Kab. Pohuwato 2005 - 2012, Diolah.

Tabel 4.10 di atas memperlihatkan belanja langsung dari tahun 2005 sampai tahun 2009 lebih tinggi dibanding belanja tidak langsung. Namun tahun fiskal 2010 sampai 2012 belanja tidak langsung mulai mendominasi.

Pola belanja seperti ini hampir dialami oleh semua kabupaten/ kota yang baru dimekarkan di Indonesia. Tahun-tahun pertama kecenderungan belanja langsung lebih tinggi, setelah lima tahun berjalan mulai terjadi pembalikan belanja. Pola kedua jenis belanja dapat disimak pada grafik 4.10 di bawah ini.

Grafik 4.10
Perbandingan BL dan BTL Kab. Pohuwato 2005 - 2012



Sumber: APBD Kab. Pohuwato 2005 - 2012, Diolah.

Grafik 4.10 memberikan informasi bahwa pada selama lima tahun pertama belanja langsung lebih tinggi. Memasuki lima tahun kedua, perlahan terjadi pola penganggaran dimana belanja tidak langsung mulai meningkat signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin mapan struktur organisasi pemerintah daerah, jumlah pegawai makin meningkat yang berdampak terhadap belanja tidak langsung makin meningkat pula.

e. Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bone Bolango berbarengan dengan Pohuwato berdiri sendiri, namun tahun fiskal baru berjalan tahun 2006. Total pendapatan Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 230,806 sementara total belanja sebesar Rp. 228,198. Pada tahun fiskal 2012, total pendapatan Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 434,314 dan total belanja sebesar Rp. 464,918.

Sedangkan perbandingan kedua jenis belanja dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11.
Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kab. Bone Bolango, 2006 - 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2006	89,046	133,209
2007	177,024	97,460
2008	210,114	118,810
2009	150,653	178,814
2010	164,654	191,434
2011	180,463	213,096
2012	187,955	276,962

Sumber: APBD Kab. Bone Bolango 2006 - 2012, Diolah

Pola belanja Kabupaten Bone Bolango tahun fiskal pertama terlihat belanja tidak langsung lebih tinggi. Tahun 2007 - 2008 sebaliknya belanja langsung lebih tinggi dibanding belanja tidak langsung. Tahun fiskal berikutnya kondisinya sama dengan pola belanja daerah lain, belanja tidak langsung makin tinggi dibandingkan dengan belanja langsung. Postur alokasi anggaran yang demikian tercermin dengan jelas bahwa APBD lebih dari separuh hanya untuk gaji pegawai.

Sehingga pada akhirnya anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan birokrasi, sementara belanja barang dan jasa serta belanja modal secara proporsional makin kecil. Tidak banyak yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat jika belanja langsung terbatas. Sementara investasi swasta yang diharapkan menjadi *leverage* pertumbuhan ekonomi masih minim. Kondisi kedua jenis belanja Kabupaten Bone Bolango sampai tahun anggaran 2012 dapat disimak pada grafik 4.11 berikut ini.

Grafik 4.11
Perbandingan BL dan BTL Kab. Bone Bolango 2006 - 2012



Sumber: APBD Kab. Bone Bolango 2006 - 2012, Diolah.

Berubahnya postur anggaran dengan makin meningkatnya belanja rutin melampaui belanja pembangunan sebagai ilustrasi nyata bahwa pembenahan birokrasi cenderung tidak berjalan. Jika kondisi ini dibiarkan berjalan maka APBD dapat dikategorikan anggaran yang kurang sehat.

f. Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2008 total pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 162,416 dan total belanja sebesar Rp. 135,785 terjadi surplus, dan tahun anggaran 2012 total pendapatan sebesar Rp. 342,861 dan total belanja sebesar Rp. 389,252 sebaliknya terjadi defisit anggaran. Sementara bila dilihat dari perkembangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12.
Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kab. Gorontalo Utara, 2008 - 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2008	67,983	55,968
2009	213,770	82,167
2010	185,364	107,894
2011	255,039	136,881
2012	230,374	158,878

Sumber: APBD Kab. Gorontalo Utara 2008 - 2012, Diolah

Terlihat pada tabel bahwa 4.12 bahwa mulai tahun fiskal 2008 sampai tahun 2012 belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Pola penganggaran seperti ini cukup ideal, karena pendanaan APBD lebih banyak untuk belanja modal dan investasi. Untuk jangka panjang proporsi belanja dapat terjaga dengan baik, karena kelihatannya daerah baru biasanya belanja langsung lebih tinggi pada lima tahun pertama. Periode berikutnya perlahan belanja tidak langsung naik melampaui belanja langsung.

Namun jika dilihat dari kinerja keuangan dan ekonomi Gorontalo Utara sebagaimana digambarkan pada proporsi penerimaan daerah melalui PAD maupun Dana Perimbangan trendnya cukup positif, itu berarti bahwa Gorontalo Utara dapat menjalankan otonomi daerah pada jalurnya, meskipun capaian untuk menjadi daerah yang benar-benar mandiri masih cukup panjang. Gambaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat disimak pada grafik 4.11 di bawah ini.



Sumber: APBD Kab. Gorontalo Utara 2008 - 2012, Diolah.

Setidaknya selama lima tahun terakhir, atau semenjak berdirinya Gorontalo Utara komitmen peme-rintah daerah (bupati/walikota) cukup baik di dalam menjaga kesinambungan anggaran. Pengeluaran pemerin-tah untuk pembentukan modal memang sangat dibutuhkan ditengah masih terbatasnya arus investasi masuk .

4.2. Pembahasan

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dengan baik, diantaranya; a) Kemampuan keuangan daerah yang optimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, b) Ketergantungan terhadap bantuan pusat minim, maka dari itu, PAD harus menjadi sumber utama. Kedua ciri tersebut akan signifikan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kerangka melihat kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi, salah satu tolok ukur yang dijadikan parameter melalui kemampuan dan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan alat analisis kinerja keuangan daerah merujuk konsep Musgrave & Musgrave (1991), serta menggunakan data sekunder APBD kabupaten/kota Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 akan didapatkan nilai tertentu dari aspek kemandirian/desentralisasi fiskal dan derajat otonomi. Berikut hasil pengukuran derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo maka didapatkan gambaran sebagai berikut;

Tabel 4.13.
Derajat Desentralisasi Fiskal Kab/Kota di Gorontalo, 2012.

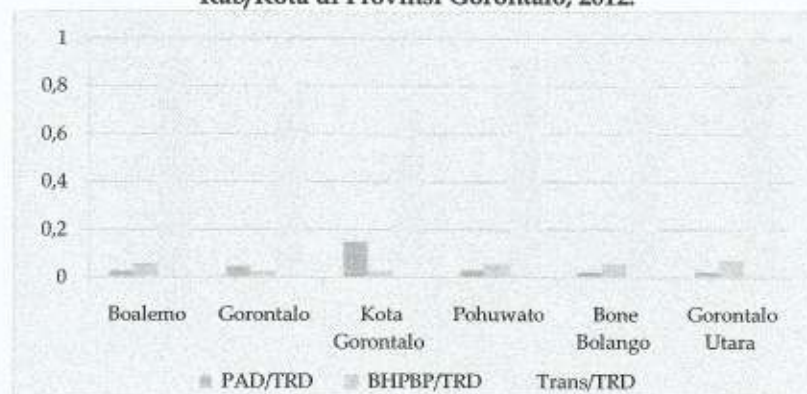
Kab/Kota	PAD/TRD	HPBP/TRD	Trans/TRD
Boalemo	0.033775	0.053327	0.904343
Gorontalo	0.050882	0.022096	0.810072
Kota Gorontalo	0.155560	0.024542	0.742288
Pohuwato	0.036596	0.051507	0.908585
Bone Bolango	0.029356	0.053307	0.864482
Gorontalo Utara	0.031224	0.065030	0.920470

Sumber: APBD Kab/Kota di Gorontalo, 2012. Diolah

Tabel 4.13 di atas memberikan gambaran tingkat kemampuan fiskal kabupaten/kota tahun 2012 di Gorontalo untuk membiayai kebutuhan anggaran belanja daerahnya dengan melihat perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Penerimaan Daerah (TPD). Enam kabupaten/kota yang dianalisis menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango memiliki derajat kemampuan fiskal sangat rendah yakni sebesar 0,029 %, dan yang tertinggi Kota Gorontalo sebesar 0,155 %.

Sedangkan perbandingan peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan TPD daerah menunjukkan Kabupaten Gorontalo paling rendah hanya sebesar 0,0220 % dan tertinggi Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,065. Untuk sumbangan (transfer) dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianalisis dengan membandingkan rasio Sumbangan dan Bantuan pemerintah pusat (Transfer) terhadap TPD terlihat Kota Gorontalo terendah sebesar 0,742 dan tertinggi Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,920.

Grafik 4.13.
Perbandingan TPD Terhadap Sumber-Sumber Pendapatan
Kab/Kota di Provinsi Gorontalo, 2012.



Sumber: APBD Kab/Kota di Gorontalo, 2012. Diolah.

Berdasarkan informasi grafis 4.13 tersebut di atas dapat dilihat bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo terhadap pusat masih sangat tinggi, di mana persentase kontribusi PDS terhadap APBD berkisar di bawah 1 % untuk seluruh daerah otonom.

Untuk hasil pengukuran kemandirian fiskal kabu-paten/kota di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini.

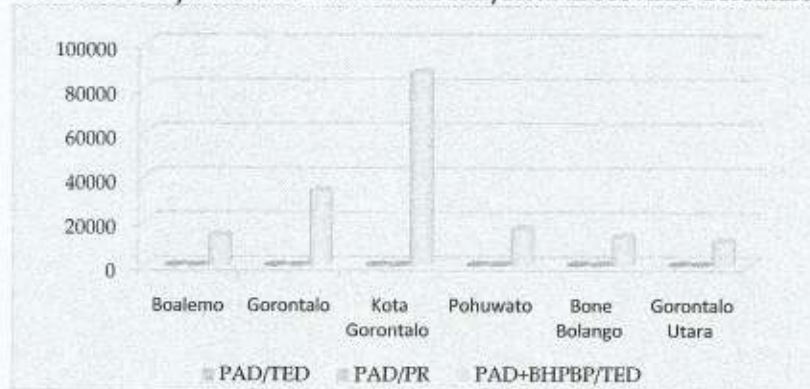
Tabel 4.14.
Derajat Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Gorontalo, 2012.

Kab/Kota	PAD/TED	PAD/PR	PAD+BHPBP/TED
Boalemo	0.031645	0.058368	13,310.170465
Gorontalo	0.051427	0.078247	33,595.217919
Kota Gorontalo	0.153858	0.238584	87,000.024273
Pohuwato	0.035687	0.060942	16,386.634571
Bone Bolango	0.027424	0.046035	12,749.998798
Gorontalo Utara	0.027489	0.067347	10,700.057250

Sumber: APBD Kab/Kota di Gorontalo, 2012. Diolah.

Tabel 4.14 memberikan informasi bahwa rasio perbandingan antara Total Pengeluaran Daerah (TED) dengan penggunaan PAD terkecil Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,0074 dan tertinggi Kota Gorontalo sebesar 0,1538. Perbandingan pengeluaran rasio Pengeluaran Rutin (PR) terhadap PAD juga tidak terlalu jauh berbeda, terlihat Kabupaten Bone Bolango kemampuan membiayai peng-eluaran rutin yang ditutupi oleh PAD terkecil sebesar 0,046 tertinggi Kota Gorontalo sebesar 0,238. Jika PAD dan bagi hasil dijumlahkan maka kemampuan mencover belanja total Kota Gorontalo tertinggi sebesar 87,000, dan terendah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 10,700. Ilustrasi derajat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Gorontalo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.14.
Ilustrasi Derajat Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Provinis Gorontalo



Sumber: APBD Kab/Kota di Gorontalo, 2012. Diolah.

Grafik 4.14 memperjelas posisi kemampuan pem-biayaan kabupaten/kota di Gorontalo. PAD terhadap total belanja maupun belanja rutin itu sendiri kemampuannya sangat kecil. Dengan demikian seluruh daerah otonom di Gorontalo sangat sulit melakukan kreasi pendanaan untuk kegiatan investasi, maupun pembangunan infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Solusinya, pembentukan *partnership* antara pemerintah daerah dan swasta sangat dibutuhkan untuk investasi maupun pembangunan infrastruktur, ini diperlukan karena kemampuan daerah sangat terbatas. Pada kondisi tertentu *government expenditure* dapat diharapkan menggerakkan perekonomian, hanya saja kecenderungannya saat ini lebih banyak untuk belanja rutin (belanja tidak langsung).

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan,

Berdasarkan hasil analissi dan pembahasan maka ada beberapa kesimpulan penting penelitian, diantaranya;

1. Seluruh daerah otonom di Provinsi Gorontalo kecenderungan proporsi penerimaan sendiri masih sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan lewat mekanisme Dana Perimbangan.
2. Pengeluaran pemerintah daerah otonom di Provinsi Gorontalo proporsi belanja langsung lebih besar untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung, kecuali Gorontalo Utara.
3. Kemampuan dan kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih kecil, dengan sendirinya kemandirian fiskal masih jauh dari yang diharapkan

5.2. Implikasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota yang ada di Gorontalo tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, sebagai dampak dari belum optimalnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Kedua komponen sumber pendapatan tersebut sangat dominan diharapkan, sebab pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan masih sangat terbatas. Bahkan beberapa daerah belum ada BUMD selain PDAM, sementara kinerja PDAM di Gorontalo masih kurang optimal.

5.3. Saran

Pemerintah daerah di Gorontalo perlu memikirkan alternatif pendanaan berupa pinjaman, karena model pinjaman dimungkinkan untuk membiayai pem-bangunan infrastruktur dasar. Disamping membangun

partnership secara maksimal dengan pihak swasta untuk investasi. Terbatasnya pendanaan pemerintah, maka swasta harus menjadi tumpuan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib melakukan perbaikan pelayanan publik maupun menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan berbagai macam insentif bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, Muh. Amir, *Kemampuan dan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo*, Workingpaper 02082013, FEB UNG.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*, Workingpaper, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Indonesia.
- Musgrave, Richard. A. & Musgrave, Peggy. B., (1991). "*Keuangan Negara dalam Teori danPraktek*". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nota APBD Kabupaten/Kota 2001 – 2010
- Nota Keuangan Pemerintah RI 2001 – 2010
- Sumarsono, Hadi, 2009, *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004)*, JESP Vol. 1, No. 1, Hal. 15 – 26.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIO DATA SINGKAT

Identitas Diri:

Nama : Muhammad Amir Arham
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 25 Juli 1972
Pekerjaan : Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
Alamat Korespondensi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri
Gorontalo Jalan Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Alamat e-mail : amier_archam@yahoo.com dan iftyra_0508@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 182 Dannuang Bulukumba, 1985
2. SMP Negeri 1 Bulukumba, 1988
3. SMA PGRI Bulukumba, 1991
4. Strata Satu (S1) Universitas Negeri Manado, 1998
5. Strata Dua (S2) Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
6. Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, 2013.

Riwayat Pekerjaan:

1. Peneliti Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi (KPPOD) Jakarta, 2002 - 2003.
2. Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Palu, 2005 - 2006.
3. Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah, 2005 - Sekarang
4. Sekretaris Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2008.
5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Sejak 2006.

Karya Tulis Lima Tahun Terakhir:

Buku:

1. Esai-esai Ekonomi; Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia, 2008 (Penulis)
2. David Bobihoe Akib; Menembus Mata Hati Gorontalo, 2008 (Penulis)
3. Profile, Potensi, Peluang Investasi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Boalemo, 2008 (Penulis).
4. Menilai Sisi Lain Otonomi Daerah, Bagaimana Seharusnya; Prisma Pemikiran dan Kebijakan Rusdy Mastura, 2009. (Penulis)
5. Pengelolaan BUMN Dalam Perspektif Otonomi Daerah; Penerapan AHP dan Game Theory Kasus PT. Semen Tonasa, 2010 (Penulis)
6. Chapter of Life, Seorang Sahabuddin Mustapa; Aktifis, Pendidik dan Pemimpin (2011)
7. Regulasi Kebijakan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia, 2011 (Penulis).

8. Menggerakkan Lokomotif Nasional dari Timur, 2013 (Penulis)

Artikel Jurnal:

1. Perencanaan Pengembangan Perekonomian Kota Gorontalo dan Pemetaan Potensi Wilayah. Jurnal Oikos-Nomos September 2008.
2. Dampak Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pembentukan PDB (Pertumbuhan), Jurnal oikos-Nomos, 2010.
3. Analisis Perencanaan dan Kebijakan Perekonomian Kabupaten Pohuwato Gorontalo Melalui Sektor Unggulan, Jurnal Oikos-Nomos, 2011.
4. Analisis Granger Causality Pengeluaran Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Oikos-Nomos, 2013.

Aktifitas Riset dan Seminar Lima Tahun Terakhir:

1. Riset; Analisis Core Competence dan Identifikasi sektor Unggulan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pohuwato, 2008. (IMHERE)
2. Riset; Base Line Ekonomi Papua, Bank Indonesia Papua dan Lemlit UNG, 2009.
3. Riset; Analisis Pengembangan Komoditi Kakao di Gorontalo Utara, Bappeda Gorontalo Utara dan LP2EB FEB UNG, 2009.
4. Riset; Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektor dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Sulawesi dan Jawa, 2013.
5. Riset; Evaluasi Pengadaan dan Pemanfaatan Air Bersih di Provinsi Gorontalo, Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2013.
6. Riset; Evaluasi Pelaksanaan RPJM Kabupaten Bone Bolango, 2013.
7. Panelis Debat Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Gorontalo, 2010.
8. Peserta Seminar; International Conference Islamic Finance, Bank Indonesia Bandung, 2012.
9. Panelis Debat Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, 2013.
10. Panelis Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gorontalo, 2013.

Gorontalo, Maret 2014



Dr. Muhammad Amir Arham



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

NOMOR : 338 /UN47/2013

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN ATAS BIAYA SENDIRI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang

- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi dan untuk meningkatkan mutu ketenagaan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo maka perlu digalakkan usaha-usaha penelitian;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a;
- c. bahwa untuk kepentingan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi; al;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 110/M Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.0 Tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Memperhatikan

- : Proposal Penelitian Dosen di Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN ATAS BIAYA SENDIRI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
- Pertama : Menunjuk Dosen Peneliti dan Judul Penelitian atas biaya sendiri dalam lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas Peneliti :
a. melaksanakan penelitian sesuai judul penelitian dengan penentuan kegiatan yang tepat sesuai waktu yang telah ditetapkan;
b. batas waktu pemasukan Laporan Hasil Penelitian selambatnya **tanggal 15 Mei 2014**.
- Ketiga : Bentuk laporan mengikuti petunjuk sesuai Buku Pedoman Penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2010.
- Keempat : Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan penelitian ini sepenuhnya adalah tanggungan peneliti.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 29 November 2013

REKTOR,

Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 196006031986031003

Tembusan :

- Yth. Mendiknas RI di Jakarta;
- Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Yth. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo;
- Yth. Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN ATAS BIAYA SENDIRI

NOMOR : 338 /UN47/2013
TANGGAL : 29 November 2013

NO	NAMA	NIP / GOL	FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN	PEMBIMBING
1.	Dr. Muhammad Amir Arham, ME	197207252006041002/ Lektor IId	FEB	Analisis Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	-

REKTOR,

Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 196006031986031003